



### SURAT PEMBACA

Persyaratan : Sertakan Fotokopi KTP atau SIM

### Bersihkan BPK dari Auditor Nakal

Sebagai masyarakat, membaca kasus Kementerian Desa yang lengkapnya disebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) saya menjadi prihatin. Ternyata selama ini semua bisa diperdagangkan. Pantas saja, setelah pemeriksaan dan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan diumumkan, tetap saja kasus korupsi marak. Padahal lembaga yang menjadi objek periksa dapat opini wajar tanpa pengeculian (WTP).

Mestinya, sejak audit awal, semua kesalahan diungkap secara wajar jangan lagi ada kompromi dengan pihak yang diperiksa. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hendaknya menjaga kredibilitas lembaganya, bukan malah menjadi pedagang status. Jika kasus Kemendes ini terbukti, maka BPK harus banyak berbenah. Jangan lagi pekerjakan auditor yang bermental pedagang. Mereka harus berkerja sesuai tugasnya secara profesional.

Menurut saya ada baiknya usulan Menteri Desa diikuti yakni melakukan audit ulang terhadap kementerian tersebut. Jika hasilnya memang terjadinya perubahan status dengan imbalan uang maka tentu harus ditindaklanjuti. Langkah KPK menangkap para tersangka patut diapresiasi. Tetapi bila memang terjadi kesalahan audit, maka status yang diperoleh Kemendes memang Wajar Tanpa Pengecualian maka auditor BPK telah bekerja dengan benar. Jadi, kasus suap itu terjadi karena gratifikasi semata.

Yang jelas, bagi kami warga negara Indonesia, kasus ini mengindikasikan adanya kompromi atas hasil pemeriksaan oleh auditor BPK. Kejadian ini tentu akan membuat kredibilitas BPK diragukan. Saya berharap semua perilaku kompromi yang menguntungkan pribadi-pribadi dengan mengunakan kedudukan atau jabatan harus ditindak. Saya berharap KPK terus melakukan hal-hal terbaik bagi negeri ini.

Putu Subagia Denpasar, Bali

Edisi : Sabtu, 3 Juni 2017'
Hal : 6.





## Bangli Raih WTP untuk Pertama Kalinya

Bupati Made Gianyar Apresiasi Kerja Keras Pegawai

KERJA keras seluruh pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dalam pengelolaan keuangan daerah akhirnya membuahkan hasil. Pemkab Bangli tahun ini berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016. Atas keberhasilan ini, Bupati Bangli I Made Gianyar memberikan apresiasi terhadap seluruh pegawai yang telah bekerja maksimal sehingga bisa meraih WTP sebagaimana yang diharapkan selama ini.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan pemerintah tahun 2016 dilakukan Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Bali Yulindra Tri. LHP ini diterima langsung Bupati Bangli I Made Gianyar dan Ketua DPRD Bangli di auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (2/6) kemarin. LHP atas laporan keuangan yang diserahkan

tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan yakni LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016 yang memuat opini pemeriksaan, LHP atas sistem pengendalian intern dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016 serta LHP atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016.

Meski berhasil meraih opini WTP, BPK tetap memberikan sejumlah rekomendasi untuk ditindaklanjuti Pemkab Ban-gli selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. BPK juga tetap mendorong Pemkab Bangli untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sesuai rekomendasi, untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah secara sistemik dan konsisten termasuk dalam hal ini penerapan basis akrual dalam pertanggungjawaban dan

pelaporan keuangan daerah yang sudah diterapkan mulai tahun 2015.

Bupati Bangli I Made Gianyar didampingi Wakil Bupati Sang Nyoman Sedana Arta serta Sekda Bangli Ida Bagus Giri Putra saat ditemui siang kemarin, menyampaikan rasa bangga sekaligus bahagia atas opini WTP yang berhasil diraih Kabupaten Bangli tahun ini. Terlebih opini WTP diraih untuk pertama kalinya sejak BPK melakukan pemerintah. Sebelumnya, Kabupaten Bangli hanya berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Menurut Made Gianyar, keberhasilan yang diraih Kabupaten Bangli ini merupakan bukti nyata dari hasil usaha dan kerja keras seluruh pegawai di lingkungan Pemkab Bangli yang telah melakukan perbaikan terhadap kelemahan-kelemahan yang terjadi dalam pengelolaan keuangan daerah selama ini. "Tanpa kerja keras pegawai tentunya opini WTP ini tidak bisa kita raih," ujarnya.



TERIMA LHP - Bupati Bangli I Made Gianyar bersama Ketua DPRD Bangli saat menerima LHP di kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali, Jumat (2/6) kemarin.

Sementara itu, Ketua DPRD Bangli Ngakan Kutha Parwata dalam kesempatan yang sama kemarin, mengucapkan selamat kepada Bupati dan Wakil Bupati Bangli serta jajarannya atas keberhasilan yang diraih Bangli tahun ini. Menurutnya, predikat WTP yang diraih kali ini merupakan buah kerja keras dan se-

mangat pegawai selama ini.

Namun, Kutha Parwata juga mengingatkan hal ini bukan hasil akhir namun merupakan awal untuk lebih baik ke depan. "Karena mempertahankan jauh lebih sulit daripada meraih. Mudahudahan ke depan opini WTP ini bisa tetap dipertahankan," katanya. (ad209)

Edisi: Sabtu, 3 Juni 2017

Hal : 8





# Gianyar Raih WTP Tiga Kali Berturut-turut

PEMERINTAH Kabu-paten (Pemkab) Gianyar kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2016. LHP diserahkan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho kepada Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra didampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog, Jumat (2/6) kemarin, di Auditorium Kan-tor RPK Barrahilan B tor BPK Perwakilan Provinsi

Penyerahan LHP diber-ikan kepada para Ketua DPRD dan Bupati/Wali Kota -Provinsi Bali, di mana seluruhnya memperoleh WTP. Dengan raihan ini, Kabupaten Gianyar secara berturut-turut mendapat predikat WTP. Sebelumnya



TERIMA LHP - Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra saat menerima LHP BPK.

WTP juga diberikan untuk LKPD Tahun Anggaran 2014

dan 2015. Yulindra Tri Kusumo Nugroho menyampaikan, LHP atas laporan keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian yang tidak dapat dipisahkan, yakni LHP atas LKPD Tahun

Anggaran 2016 yang memuat Opini Pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2016 dan LHP atas Kepatuhan ter-hadap Peraturan Perundangundangan dalam Kerangka Pemeriksaan LKPD Tahun

Anggaran 2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan, opini BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2016 Kabupaten Gianyar adalah WTP

"Dari tingkat provinsi sampai dengan kabupaten/ kota, laporan keuangan tahun anggaran 2016 seluruhnya memperoleh opini tanpa pengecualian," kata Yulindra Tri Kusumo Nugroho.

Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra menga-takan predikat WTP yang berhasil diraih Kabupaten Gianyar merupakan hasil kerja keras semua pihak, baik eksekutif dan legislatif serta dukungan masyarakat dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang baik. Raihan WTP ini diharapkan dapat memoti vasi semua pihak untuk lebih meningkatkan pengelolaan keuangan daerah dan lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. "Dengan berturut-turut

meraih WTP kita tidak boleh cepat berpuas diri. Tetapi menjadikannya sebuah mo-tivasi untuk lebih meningkatkan tata kelola keuangan dan pemerintahan yang baik ke depannya, sehingga Gianyar menjadi lebih baik lagi,

terang Mahayastra. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Gianyar I Made Togog mengaku bangga atas pen capaian yang diraih Pemkab Gianyar tersebut. Namun dirinya berharap dengan predikat WTP tiga kali berturut-turut ini tidak membuat jajaran Pemkab Gianyar terlena. Apa yang diraih saat ini harus menjadi motivasi untuk membangun budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

"Dengan raihan predikat opini WTP, kinerja Pemkab Gianyar dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan tata pemerintahan dapat terus ditingkatkan, Made Togog. (ad222)

: sabtu, 3 Juni 2017 Edisi

Hal

### Sub Bagian Humas dan Tata Usaha BPK RI Perwakilan Provinsi Bali



### Bali Post



### Wawali Jaya Negara Terima Piagam WTP dan LHP TA 2016 Pemkot Pertahankan Predikat WTP Lima Kali Berturut-turut dari BPK-R

HASIL pemeriksaan Laporan Keuangan Pemkot Denpasar Ta-hun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI hun Anggaran 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Perolehan ini menjadi keberhasilan Pemkot Denpasar mempertahankan opini WTP lima kali berturut-turut sejak tahun 2012. Penyerahan Piagam WTP dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Tahun Anggaran 2016 dilakukan oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho, diterima Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara bersama Wakil Ketua DPRD Kota Densara Wayan Mariyana Wandira di Kantor BPK-RI Perwakilan Bali, Jumat (2/6) kemarin. Penyerahan LHP dilaksanakan secara bersamaan yang menghadirkan kepala daerah kabupaten/kota se-Provinsi Bali, yang dilanjutkan dengan pengumuman opini BPK atas hasil pemeriksaan keuangan daerah oleh Kepala BPK-RI Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho. "Berdasar-kan hasil pemeriksaan, opini BPK atas Laporan Keuangan TA 2016

yang seluruhnya memperoleh WTP," ujar Kepala BPK-RI Per-wakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho usai menyerahkan LHP

wakian Bah Yuhndra Irikusumo Nugroho usai menyerahkan LHP kepada masing-masing kepala daerah dan pimpinan DPRD.
Lebih lanjut dikatakan, LHP atas Laporan Keuangan tersebut terdiri dari tiga bagian. Yakni, LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2016 yang memuat opini pemeriksaan, LHP atas Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan LHP atas Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam kerangka pemeriksaan laporan keuangan. Demi efektifnya hasil pemeriksaan BPK, sesuai ketentuan dalam Pasal 20 UU Nomor 15 Tahun 2004 mengharapkan seluruh kabupaten/kota dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK selambat-lambatnya enam puluh hari atasih LIPB ditama.

memnaskanjud rekomenasi BFK selambat-lambatnya enam puluh hari setelah LHP diterima. Wakil Wali Kota IGN Jaya Negara menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPK-RI beserta jajarannya yang selama ini terus membimbing dan men-garahkan. Sehingga pengelolaan pelaksanaan program pembangunan di Kota Denpasar dapat terwijud, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keberhasilan Kota Denpasar juga tidak terlepas dari kualitas sumber daya manusianya. Karenanya, ke depan Pemkot Denpasar tidak henti-hentinya meminta bimbingan kepada BPK-RI dan jajarannya untuk terus melakukan pembinaan, sehingga keberhasilan ini bisa terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dikatakan, dengan keberhasilan meraih opini WTP ini dapat menjadikan semangat bagi aparatur di Pemkot Denpasar, sehingga nantinya dapat berimbas pada pelayanan publik semakin meningkat dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Denpasar.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Denpasar Wayan Mariyana Wandira mengatakan, DPRD Kota Denpasar sebagai legislator bersama Pemkot Denpasar dengan prestasi WTP yang telah diraih berturut-turut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan.

jukkan keseriusan pemerintah dalam pengelolaan keuangan.



PIAGAM WTP - Wakil Wali Kota Denpasar IGN Jaya Negari bersama Wakil Ketua DPRD Kota Denpasar Wayan Mari yana Wandira menerima Piagam WTP dari Kepala BPK-R Perwakilan Bali Yulindra Tri Kusumo Nugroho di Kanto. BPK-RI Perwakilan Bali, Jumat (2/6) kemarin.

sebagai hadiah, namun ke depan lebih ditingkatkan lagi mengacu pada aturan-aturan yang ada, serta sesuai dengan program

bentuk keseriusan Pemkot Den pasar dengan hasil WTP sebaga prestasi bagi Kota Denpasa dalam pengelolaan keuangai

Edisi 3 Juni : Sabtu 2017. Hal







## Karangasem Pertahankan Opini WTP

PEMERINTAH Kabupaten Karangasem berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2016. Ini menjadi capaian membanggakan Karangasem, mengulang prestasi tahun sebelumnya. Prestasi ini sekaligus menegaskan, bahwa pengelolaan keuangan Karangasem semakin baik.

Piagam Opini WTP itu diserahkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Bali kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem, yang diterima Bupati Karangasem IGA Mas Sumatri, Jumat (2/6) pagi kemarin, di aula lantai satu Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bali. Bupati Mas Sumatri usai menerima penghargaan mengatakan, opini WTP Pemkab Karangasem ini merupakan kali kedua yang diperoleh di masa kepemimpinannya, Dia mengaku sangat senang dan bangga.

kepemimpinannya, Dia mengaku sangat senang dan bangga. "Tentu ini patut disyukuri. Sebuah kebanggaan bagi daerah Karangasem karena mampu mempertahankan penghargaan dari BPK RI ini," ujar Bupati Mas Sumatri.

Meski demikian, Bupati Mas Sumatri juga menegaskan dengan diperolehnya penghargaan ini, wajib bagi Kabupaten Karangasem untuk terus mempertahankannya. Caranya, tentu terus-menerus meningkatkan kinerja penggunaan keuangan daerah sehingga mampu terus mempertahankannya. "Dengan bekerja tetap berpegang teguh pada peraturan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, akuntabel dan bermartabat, niscaya penghargaan ini bisa kami pertahankan terus," ucapnya.

Dia melanjutkan, opini itu diperoleh atas komitmen dan kerja keras jajaran Pemerintah Kabupaten Karangasem dalam mengambil langkah-langkah serta upaya konkret perbaikan dalam meningkatkan kualitas kerja, terkait penyusunan dan pengelolaan keuangan daerah. Pada kesempatan itu, Bupati Mas Sumatri berterima kasih kepada semua OPD, karena atas jerih payahnya maka laporan keuangan Pemkab Karangasem ini tetap dapat mempertahankan prestasi peringkat WTP-nya.

"Jangan sampai kita terlena dengan prestasi ini. Ini tanggung jawab kita bersama sebagai tim kerja Pemkab Karangasem untuk bekerja lebih keras lagi, karena mempertahankan sebuah prestasi lebih sulit daripada memperolehnya," tegasnya. (ad214)

Edisi	: Sabtui	3 Juni	2017.
Hal	:		